# II. LANDASAN TEORI

## 2.1. Teori Legitimasi

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. O'Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat, Gray *et al.* (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004). Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat.

Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam Fitriyani (2012) menyatakan legitimasi dapat diperoleh

manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

### 2.2 Teori Pesinyalan (*Signalling Theory*)

Teori ini menekankan kepada pentingnya informasi dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan catatan penting suatu perusahaan baik di masa lalu, saat ini maupun di masa yang akan datang. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi anatara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pengguna laporan keuangan.

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi

pada waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Jogiyanto, 2000). Sama halnya jika dikaitkan dengan hubungan kinerja dengan pengungkapan sosial atau lingkungan, yaitu jika suatu perusahaan memiliki kinerja finansial yang tinggi maka dapat memberikan sinyal positif bagi investor atau masyarakat melalui laporan keuangan atau laporan tahunan yang akan diungkapkan.

### 2.3 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006). Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagaian keuntungannnya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan professional merupakan wujud nyata dari pelaksanaan CSR di Indonesia dalam upaya penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Beragam cara yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan CSR. Ada perusahaan yang mendirikan yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bekerja sama dengan pihak lain atau dengan menjalankan sendiri CSR mulai dari perencanaan hingga implementasinya, serta ada juga perusahaan yang bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR.

### 2.3.1 Pengungkapan

Pengungkapan atau *disclosure* dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut dan informasi tersebut harus bermanfaat jika tidak bermanfaat tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai (Ghozali dan Chariri, 2007). Ada tiga konsep pengungkapan yang yaitu:

1. Cukup (*adequate*)
2. Wajar (*fair*)
3. Lengkap (*full*)

Yang paling sering digunakan dari ketiga pengungkapan tersebut adalah cukup yang mencakup pengungkapan yang minimal yang harus dilakukan agar informasi tidak menyesatkan. Pengungkapan wajar adalah tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Pengungkapan lengkap adalah penyajian semua informasi yang relevan. Terlalau banyak informasi juga tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami.

### 2.3.2Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR Disclosure)*

Gray *et al.,* (2001) dalam Rakhiemah dan Agustia (2009) menyatakan bahwa CSR *Disclosure* merupakan suatu proses penyedia informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan yang berorientasi sosial. Pengungkapan CSR merupakan pengungkapan suatu informasi mengenai aktivitas sosial yang dilakukan

perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Chariri dan Ghozali (2007) pengungkapan dapat diartikan sebagai pemberian informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Tujuan pengungkapan dikategorikan menurut *Securities Exchange Commission (SEC)* menjadi dua, yaitu 1) *protective disclosure* yang sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) *informative disclosure* yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan . Pengungkapan berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial bertujuan untuk menyediakan informasi yang memungkinkan dilakukan evaluasi pengaruh perusahaan terhadap masyarakat. Pengaruh kegiatan ini bersifat negatif, yang menimbulkan biaya sosial pada masyarakat, atau positif yang berarti menimbulkan manfaat sosial bagi masyarakat (Yuningsih, 2001 dalam Sitepu, 2011).

Ada 2 jenis pengungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal. Yang pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada (Fitriyani, 2012). Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Pengungkapan sosial di Indonesia termasuk ke dalam kategori *valuntary disclosure*.

### *2.4* Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*) (Suratno *et al*., 2006). Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Kinerja lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan akuntansi lingkungan.

Akuntansi lingkungan merupakan pengakuan dan integrasi dampak isu-isu lingkungan pada sistem akuntansi tradisional suatu perusahaan (Halim dan Irawan,1998). Akuntansi lingkungan tidak hanya menghitung biaya dan manfaat ekonomi perusahaan, tetapi juga memperhitungkan biaya lingkungan yang merupakan eksternalitas ekonomi negatif atau biaya-biaya yang timbul di luar pasar. Kendala yang dihadapi oleh akuntansi lingkungan adalah belum adanya standar pengukuran dan penilaian dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, sebab tidak semua biaya dan manfaat lingkungan mudah diidentifikasi dan diukur dalam ukuran moneter (Halim dan Irawan, 1998).

Di Indonesia, kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan PROPER dari KLH (Kementrian Lingkungan Hidup). PROPER melakukan peringkat hasil kinerja lingkungan dari KLH berdasarkan kinerja lingkungan dari setiap perusahaan agar dapat dibandingkan dengan masing-masing perusahaan untuk menjadi koreksi. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Di samping itu penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan

lingkungan. Pelaksanaan PROPER saat ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja lingkungan lainnya adalah AMDAL (uji BOD dan COD air). Pada studi AMDAL, dilakukan pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk Menelaah, mengamati, dan mengukur rona lingkungan awal yang diprakirakan akan terkena dampak besar dari kegiatan pembangunan/industri, yang sangat penting terhadap lingkungan hidup. Tolak ukur kinerja lingkungan lainnya adalah GRI (Global Reporting Initiative). GRI merupakan pionir dalam pengembangan rerangka kerja pelaporan *sustainability* yang berisikan laporan ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai pembanding laporang keuangan (Lindrianasari, 2007)

Ada tiga faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen lingkungan, (Barry dan Rondinelly, 1998 dalam Ja'far dan Arifah, 2006) yaitu:

1. *Regulatory demand,* tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan muncul sejak 30 tahun terakhir, setelah masyarakat meningkatkan tekanannya kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai dampak meluasnya polusi. Sistem pengawasan manajemen lingkungan menjadi dasar untuk skor lingkungan, seperti program-program kesehatan dan keamanan lingkungan. Perusahaan merasa penting untuk mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan, dengan berusaha menerapkan prinsip-prinsip TQEM secara efektif, misalnya

dengan penggunaan teknologi pengontrol polusi melalui penggunaan *clean technology*

2. *Cost factory,* adanya komplain terhadap produk-produk perusahaan, akan membawa konsekuensi munculnya biaya pengawasan kualitas yang tinggi, karena semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi perlu dipersiapkan dengan baik. Konsekuensi perusahaan untuk mengurangi polusi juga berdampak pada munculnya berbagai biaya, seperti penyediaan pengolahan limbah, penggunaan mesin yang *clean technology,* dan biaya pencegahan kebersuhan.
3. *Competitive requirement,* semakin berkembangnya pasar global dan munculnya berbagai kesepakatan perdagangan sangat berpengaruh pada munculnya gerakan standarisasi manajemen kualitas lingkungan. Persaingan nasional maupun internasional telah menuntut perusahaan untuk dapat mendapatkan jaminan dibidang kualitas, antara lain seri ISO 9000. Sedangkan untuk seri ISO 14000 dominan untuk standar internasional dalam sistem manajemen lingkungan. Untuk mencapai keunggulan dalam persaingan, dapat dilakukan dengan menerapkan *green alliances* (Hartman dan Stanford, 1995 dalam Rahmawati, 2012).

Sistem manajemen lingkungan yang komprehensif terdiri dari kombinasi lima pendekatan, yaitu (Ja'far dan Arifah, 2006):

1. Meminimalkan dan mencegah waste, merupakan perlindungan lingkungan efektif yang sangat membutuhkan aktivitas pencegahan terhadap aktivitas yang tidak berguna. Pencegahan polusi merupakan penggunaan material atau bahan baku, proses produksi atau praktek-

praktek yang dapat mengurangi, meminimalkan atau mengeliminasi penyebab polusi atau sumber-sumber polusi. Tuntutan aturan dan cost untuk pengawasan polusi yang semakin meningkat merupakan faktor penggerak bagi perusahaan untuk menemukan cara-cara yang efektif dalam mencegah polusi.

2. *Management demand side,* merupakan sebuah pendekatan dalam pencegahan polusi yang asal mulanya dugunakan dalam dunia industri. *Deman side management* industri mengharuskan perusahaan untuk melihat dirinya sendiri dalam cara pandang baru, sehingga dapat menemukan peluang-peluang bisnis baru.
3. Desain lingkungan, merupakan bagian integral dari proses pencegahan polusi dalam manajemen lingkungan proaktif. Perusahaan sering dihadapkan pada inefisiensi dalam mendesain produk, misalnya produk tidak dapat dirakit kembali, di-upgrade kembali, dan di recycle. *Design for environmental* (DFE) dimaksudkan untuk mengurangi biaya reprocessing dan mengembalikan produk ke pasar secara lebih cepat dan ekonomis.
4. *Product stewardship,* merupakan praktek-praktek yang dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap lingkungan melalui masalah-masalah dalam desain, manufaktur, distribusi, pemakaian atau penjualan produk. Alternatif produk yang memiliki *less pollution* dan alternatif material, sumber energi, metode processing yang mengurangi waste menjadi kebutuhan bgai perusahaan.

5. *Full cost environmental accounting,* merupakan konsep *cost environmental* yang secara langsung akan berpengaruh terhadap individu, masyarakat dan lingkungan yang biasanya tidak mendapatkan perhatian dari perusahaan. *Full cost accounting* berusaha mengidentifikasikan dan mengkuantifikasi kinerja biaya lingkungan sebuah produk, proses produksi dan sebuah proyek dengan mempertimbangan empat macam biaya, yaitu: biaya langsung; biaya tidak langsung; biaya tidak menentu; biaya yang tidak kelihatan.

## 2.5 International Standardization Organization (ISO) 14001

Dalam satu dasawarsa terakhir ini kebutuhan akan suatu sistem standardisasi semakin dirasakan urgensinya. Hal ini mendorong organisasi Internasional di bidang standardisasi yaitu ISO (International Organization for Standardization) mendirikan SAGE (*Strategic Advisory Group on Environment*) yang bertugas meneliti kemungkinan untuk mengembangkan sistem standar di bidang lingkungan. SAGE memberikan rekomendasi kepada ISO untuk membentuk panitia teknik (TC) yang akan mengembangkan standar yang berhubungan dengan manajemen lingkungan. Pada tahun 1993, ISO membentuk panitia teknik TC 207 untuk merumuskan sistem standardisasi dalam bidang lingkungan. Hasil kerja panitia TC 207 kemudian dikenal sebagai standar ISO seri 14000 (Lee Kuhre, 1996). Standar ISO seri 14000 terbagi dalam dua bidang yang terpisah yaitu evaluasi organisasi dan evaluasi produk. Evaluasi organisasi terbagi dari 3 sub sistem yaitu sub sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan dan evaluasi kinerja lingkungan. Pada dasarnya ISO 14000 adalah standar manajemen

lingkungan yang sifatnya sukarela tetapi konsumen menuntut produsen untuk melaksanakan program sertifikasi tersebut. Pelaksanaan program sertifikasi ISO 14000 dapat dikatakan sebagai tindakan proaktif dari produsen yang dapat mengangkat citra perusahaan dan memperoleh kepercayaan dari konsumen.

ISO 14001 adalah suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang pada saat ini secara luas menggunakan SML di dunia, dengan lebih dari 6.000 sertifikasi di Inggris dan 111.000 sertifikasi di 138 negara seluruh dunia. ISO 14001 adalah standar sistem manajemen utama yang mengkhususkan pada persyaratan bagi formulasi dan pemeliharaan dari SML. Tiga komitmen fundamental mendukung kebijakan lingkungan untuk pemenuhan persyaratan ISO 14001, termasuk pencegahan polusi, kesesuaian dengan undang – undang yang ada, perbaikan berkesinambungan SML.

Beberapa manfaat pendaftaran ISO 14001 antara lain :

- Meningkatkan kinerja lingkungan sesuai komitmen manajemen puncak
- Penghematan ongkos dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi energi dan penggunaan air dan minimalisasi buangan
- Mengurangi resiko dari terjadinya polusi dan kondisikondisi lainnya yang berkenaan dengan lingkungan, dan oleh karena itu penghindaran dari ongkos pembersihan yang tidak perlu dan/atau pelaksanaan tindakan dari lembaga-lembaga hukum
- Kesesuaian hukum melalui pengenalan perundangundangan baru dengan kecukupan waktu dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan terkini

Mengurangi resiko dari ketidak-sesuaian dengan perundang-undangan dan ongkos-ongkos tuntutan hukum selanjutnya

- Meningkatkan pemusatan tujuan bisnis dan mengkomunikasikan masalah-masalah lingkungan terkini Meningkatkan kemampu-labaan organisasi melalui pengurangan ongkos-ongkos dan meningkatkan kepuasan pelanggan

Sedangkan prinsip pokok dan elemen ISO 14001 menurut *ISO 14000 / ISO 14001 Environmental Management Guide* antara lain:

- Komitmen dan kebijakan

  Organisasi harus menetapkan kebijakan lingkungan dan memastikan memiliki komitmen terhadap SML.

- Perencanaan

  Organisasi harus menyusun rencana untuk mentaati kebijakan lingkungan yang ditetapkannya sendiri.

- Implementasi dan Operasi

  Agar terlaksana dengan efektif, organisasi harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mentaati kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran manajemen.

- Pemeriksaan dan Koreksi

  Organisasi harus memeriksa, memantau dan mengoreksi kinerja lingkungannnya.

## 2.6 Kinerja Komite Audit

### 2.6.1 Definisi Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengenai Komite Audit adalah:

"Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit."

Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 dikatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Definisi lainnya mengatakan bahwa komite audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Pembentukan komite audit harus dilengkapi dengan Piagam Komite Audit yang ditandatangani oleh komisaris utama dan direktur utama perseroan. Ketua maupun anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Dewan Komisaris.

Komite audit bertindak mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang bukan merupakan pihak internal perusahaan yang bersangkutan, dan memiliki keahlian, pengalaman dibidang audit dan kualitas lain yang diperlukan. Anggota komite

audit yang berasal dari dewan komisaris perseroan bertindak sebagai ketua komite audit. (http://ptkbi.com/profil/komite-perseroan/komite-audit.html).

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa :

- Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Komite audit.
- Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan Komisaris Independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi Ketua Komite audit.
- Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang diamksud independen adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris , direksi dan pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Komite audit pada saat ini telah diakui keberadaannya di hampir semua perusahaan di negara maju, terutama di Amerika Serikat, Inggris dan Kanada,

namun hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolok ukur keberhasilan atau efektivitas komite audit. Belum terdapat hasil pembuktian secara empiris mengenai hal tersebut, komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas rutin, seperti review laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen (Effendi, 2005). Oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana kinerja komite audit dalam perusahaan.

### 2.6.2 Tugas Dan Fungsi Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2002). Menurut Kepmen BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002, komite audit bertugas membantu komisaris/dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. Sedangkan menurut Peraturan Bapepam LK No. IX.1.5, komite audit bertanggung jawab melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan, melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Selain itu, pada peraturan nomor delapan poin (b), dikatakan bahwa

komite audit harus membuat laporan komite audit tentang kegiatan komite audit dalam satu tahun serta hasil notulensi rapat. Menurut peraturan Bapepam LK Nomor: Kep-643/BL/2012 komite audit harus mengadakan rapat minimal satu kali dalam tiga bulan, atau empat kali dalam satu tahun.

Pada umumnya tanggung jawab komite audit meliputi tiga bidang, yaitu :

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang;
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*). Tanggung jawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Wardhani, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) dalam Wardhani, 2011) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan perusahaan.

## 2.7 Model Penelitian

**Gambar 1. Model Penelitian**

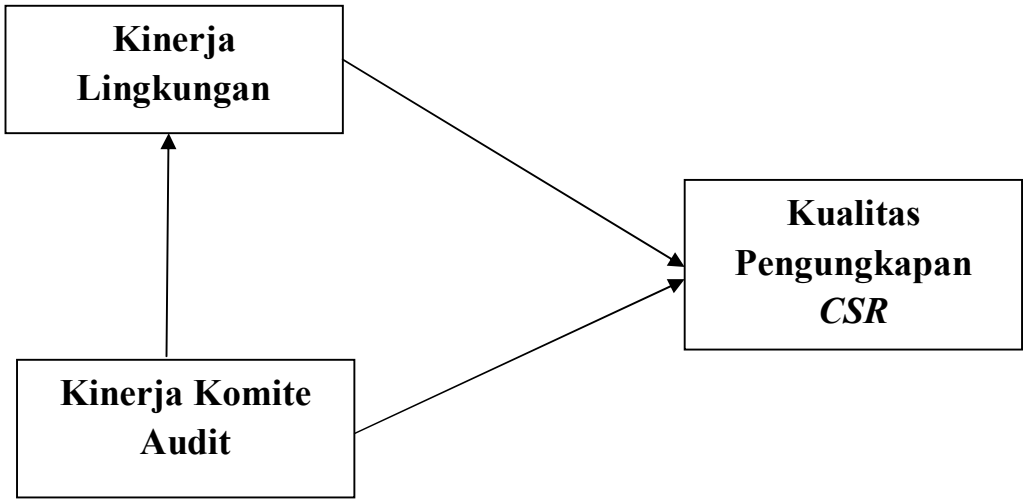


Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik atau ketika perusahaan mengeluarkan biaya terkait dengan aspek lingkungan yang secara otomatis akan membangun citra yang baik di mata *stakeholder* dan calon investor sehingga akan direspon positif oleh pasar dan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan

yang memiliki *good news* tentang kinerja lingkungannya akan meningkatkan pengungkapan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. *Good news* tersebut diharapkan akan mendapat respon positif dari investor. Akan tetapi beberapa peneliti menemukan adanya perbedaan antara *good news* tersebut dengan yang terjadi di lapangan sebenarnya. Karena itu perlu dilakukan *controling* oleh akuntan yang membuat pengungkapan CSR perusahann tersebut.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Variabel | Analisis | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| Suratno *et al*. (2006) | *Environmental performance*, kinerja lingkungan | Analisis regresi | Kinerja lingkungan memiliki hubungan positif signifikan dengan prngungkapan lingkungan. |
| Lindrianasari (2007) | Kinerja lingkungan, kualitas pengungkapan lingkungan | Analisis regresi | Kinerja lingkungan memiliki hubungan positif signifikan dengan kualitas pengungkapan lingkungan. |
| Rakhiemah dan Agustia ( 2009) | Kinerja lingkungan, pengungkapan *corporate social responsibility*. | Analisis regresi berganda | Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. |
| Triani (2010) | Kinerja lingkungan, alokasi dana CSR | Analisis regresi parsial | Tidakada hubungan positif signifikan antara kinerja lingkungan dengan alokasi dana CSR. |
| Rahmawati (2012) | Kinerja lingkungan, pengungkapan *corporate social* | Analisis regresi, uji sobel | Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *responsibility*. | | *corporate social responsibility*. |
| Fitriyani (2012) | Kinerja lingkungan, pengungkapan *corporate social responsibility*. | Analisis regresi | Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. |
| Sembiring (2005) | *Size,* Profitabilitas, Profil perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Leverage, CSR Disclosure | Analisis Regresi | Ukuran perusahaan, profil perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan CSR. |

Sumber : Dari Berbagai Jurnal

## 2.9 Hipotesis

### 2.9.1 Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan CSR

Preston (1981) dalam Lindrianasari (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dan melakukan pengungkapan yang tinggi memposisikan mereka sebagai perusahaan yang memiliki aktifitas yang berguna dan kualitas pengungkapan ini juga didorong legitimasi terhadap masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan kualitas pengungkapan lingkungannya.

Hasil penelitian Lindrianasari (2007) juga menyatakan bahwa adanya hubungan positif sebesar 41% dengan tingkat signifikan 0,000 antara kinerja lingkungan dan

kualitas pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan kualitas pengungkapan CSR.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dibentuklah hipotesis:

**Ha1 : Terdapat hubungan positif antara kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan *CSR.***

### 2.9.2 Kinerja Lingkungan dan Kinerja Komite Audit

Komite audit merupakan pihak independen perusahaan yang dipimpin oleh salah satu dewan komisaris yang salah satu fungsinya sebagai pengawas berjalannya tata kelola perusahaan dengan baik, seperti sistem informasi organisasi, struktur pengendalian intern organisasi, tingkat kepatuhan terhadap kebijaksanaan operasi, prosedur dan perencanaan, serta kualitas kinerja perusahaan. Komite audit, yang dipimpin oleh dewan komisaris melakukan rapat berkala beberapa kali dalam setahun untuk merembukkan hasil pengawasan mereka terhadap kinerja manajemen.

Penelitian Filatotchev *et al*. (2005) dalam Muamal (2011), menemukan bukti bahwa anngota dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sharma *et al.* (2009) melakukan penelitian terkait keberadaan komite audit dalam mekanisme *good corporate governance* dengan hasil bahwa frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit berhubungan dengan besarnya ukuran atau jumlah anggota komite audit dan kinerja perusahaan. Adanya frekuensi rapat

komite audit lebih banyak mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komite audit berjalan dengan efektif dalam arti bahwa tiap terjadi permasalahan dalam perusahaan dapat langsung dibahas dalam rapat komite audit sehingga dapat lebih cepat ditemukan penyelesaian sehingga tidak menurunkan kinerja perusahaan (Muamal, 2011). Salah satu kinerja perusahaan yang dibahas pada penelitian ini adalah kinerja lingkungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dibentuklah hipotesis:

**Ha2 : Terdapat hubungan positif antara kinerja lingkungan dan kinerja komite audit.**

### 2.9.3 Kinerja Komite Audit dan Kualitas Pengungkapan CSR

Komite audit sebagai badan pengawas yang independen dalam perusahaan memiliki tugas mengawasi penyusunan laporan keuangan. Salah satu laporan yang dibahas pada penelitian ini adalah pengungkapan CSR, dimana pengungkapan ini sedang menjadi sorotan publik karena banyak entitas saat ini sedang giat dalam melakukan pengungkapan CSR. Karena itu penting bagi komite audit untuk memperhatikan kualitas dan kesesuaian pengungkapan CSR dengan kinerja yang sebenarnya.

Foker (1992) dalam Wardhani (2011) mengatakan bahwa komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Penelitian lainnya mengatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh

secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan perusahaan Ho dan Wong (2001) dalam Wardhani (2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dibentuklah hipotesis:

**Ha3 : Terdapat hubungan positif antara akuntabilitas auditor internal dan kualitas pengungkapan *CSR*.**